

Kesenjangan Sosial : Bagaimana Keterkaitannya dengan Sistem Pendidikan ?

Oleh : Lucy Yosita

Negara berkembang selalu memiliki dinamika sosial yang seringkali tidak mudah untuk dipecahkan, demikian pula yang dialami oleh Indonesia. Angka pengangguran yang tinggi, demikian pula dengan angka kriminalitas serta kesenjangan sosial. Di sisi lain angka korupsi malah meningkat **ke peringkat**. Di sisi lain, banyak pakar maupun orang awam memberikan analisis-analisisnya serta pula menawarkan solusi-solusinya. Barangkali hal-hal tersebut jika dikumpulkan kiranya sudah sanggup menawarkan kondisi Indonesia yang lebih baik.

Menurut teori rekonstruksionisme dikatakan bahwa pendidikan memiliki tanggung jawab sosial dalam mewujudkan masyarakat baru, harapan sosial ini tentu saja diharapkan sejalan dengan harapan secara fisik yakni produk pembangunan. Tetapi tatanan masyarakat Indonesia saat ini nyatanya masih sering dipertanyakan. Banyak hal di Indonesia bila dicermati, memiliki sebab musabab yakni kurang seriusnya penyelenggaraan pendidikan. Hal-hal seperti kerusakan alam, kesenjangan sosial, konflik sosial, diragukannya supremasi hukum, dan sebagainya adalah bola salju yang terus bergulir yang jika ditelusuri lagi-lagi memiliki akar masalah yakni pendidikan.

Bagaimana, kepekaan terhadap alam juga kemahiran mengelola alam bisa terlahir begitu saja, jika pendidikan IPA hanya berputar-putar pada radius kelas dan laboratorium ? Bagaimana sistem sosial dapat tercipta membentuk sistem yang lebih berkeadilan, bila pendidikan IPS juga semata berkutat di kelas, belum mengakarkan jiwa sosial sehari-hari ? Bagaimana korupsi bisa diberantas, jika tanggung jawab sosial dan juga global belum ditanamkan pada jiwa, baru sebatas pada pemahaman teoritik ? Bagaimana kebiasaan perilaku (*daily habit*) yang lebih arif bisa terbentuk ?

Pendidikan Indonesia di masa Orde Baru juga terlanjur membuat suatu sekat yang maha kuat antara pendidikan dengan aspek aplikasi yakni sistem pembangunan. "Dulu" konon hal ini "dimaksudkan" untuk tercapainya ketidakadilan dalam penguasaan sumber daya alam, tidak ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, melainkan lebih pada tujuan monopoli bagi golongan tertentu. Sementara pendidikan di negara maju adalah (jauh) lebih demokratis, membuat suatu sistem yang terpadu antara pendidikan dengan aspek aplikasi atau sistem pembangunan. Tapi pertanyaannya setelah gelombang reformasi bergema sejak 1998, sudah sejauh mana perbaikan yang terjadi ? Konon kran-kran demokrasi saat ini sudah lebih dibuka. Tetapi kenyataannya saat ini yang terjadi kita kewalahan membendung arus globalisasi, yang secara jujur menggeser karakter sumber daya manusia masih lebih banyak ke arah negatif, belum seoptimal mungkin ke arah positif.

Memang, tidak juga seluruh aspek globalisasi salah, walau memang tidak juga seluruh arus globalisasi benar. Tetapi yang masih kurang benar sesungguhnya, memang adalah ketahanan mental sumber daya manusia untuk menerima dan mengelola arus globalisasi. Maka pada kondisi ini, jalannya pembangunan juga pemerataan pembangunan, tentu saja jauh dari sasaran yang diinginkan, kesenjangan sosial tetap sulit untuk diatasi, pada ketahanan generasi yang tidak menjadi lebih kuat, tentunya sulit diharapkan banyak untuk memperbaiki sistem lingkungan serta sistem sosial.

Saya memberikan semacam lemparan hipotesis, apakah benar ada hubungannya antara tingginya angka korupsi dan tingginya kerusakan alam di Indonesia, dengan pendidikan Indonesia yang sangat teoritik ? Dengan dijejalnya mereka dengan teori-teori, akhirnya mayoritas bangsa Indonesia (tentunya tidak semua) yang terbentuk tersebut menjadi bingung (*confuse generation*), akhirnya mayoritas baru sampai pada tingkatan *be satisfy due to consume*, akhirnya tidak peduli, apa saja dikonsumsi atau disikat (*to be consumed*), uang rakyat, hutan, sumber daya laut. Lalu dimana-mana yang paling semangat adalah "berbicara", ditambah lagi dengan dukungan gosip-gosip di televisi, sudah tidak paham "aplikasi" akhirnya menjadi *No Action Talk Only* (NATO). Lebih repot lagi, yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia, dari negara-negara maju, adalah baru gaya hidupnya saja, bukan hal-hal positif seperti kinerja kerja atau kejujuran misalnya. Berbeda sekali dengan di Jepang, dimana jika anda kehilangan dompet, maka Insya Allah akan kembali, karena pantang menikmati sesuatu yang bukan hasil kerja sendiri. Tetapi di Indonesia, rasanya seringkali justru sebaliknya. Silahkan, jika ada yang tertarik menelitinya.

Melakukan Tinjauan Sejenak

Mari kita sejenak meninjau ke luar. Di negara Jepang, pendidikan tidak hanya sebatas pada mendidik untuk belajar keras, tetapi mendidik untuk bekerja keras (Abas Gozali: 2000 dalam penelitiannya mengenai "Sistem Pendidikan di Jepang"). *Japanesse* atau pembelajaran budaya Jepang, memiliki proporsi tertinggi yakni 5 jam/ minggu, lebih tinggi dari jam pelajaran Matematika yakni 4 jam/minggu, lalu pengetahuan umum memiliki jatah 3 jam/ minggu. Sehingga penguasaan ilmu pengetahuan (*science*) ditanamkan betul sedari kecil dalam konteks kemanfaatan bagi sosial-kemasyarakat. Terlihat pula sasaran nasionalisme melalui pembelajaran budaya selain orientasi sosial, dan pengetahuan umum di atas. Didekatkan dengan aspek aplikasi misalnya alam dilakukan dengan mendekatkan pada lahan pertanian.

Pada kondisi di atas, jika seorang anak kecil Jepang (siswa *Elementary School*) ditanya mengenai visi-misi maka jawaban mereka memiliki nada "sangat yakin". Lain kiranya dengan siswa di Indonesia, sering terjadi seorang mahasiswa sekalipun tidak tahu apa visi-misi mereka.

Sementara, sistem pendidikan di Korea juga sejak akhir abad ke-18 menerapkan prinsip "*Practical Learning*" (penekanan aspek praktek) untuk semua aspek pengetahuan; sejarah, politik, ekonomi, ilmu alam dan sosial budaya. Contoh lain, misalnya di Gelnhausen *Elementary School*, Gelnhausen, Jerman. Secara garis besar materi yang diajarkan kepada siswa terbagi 4 hal dasar yakni *English Language Arts*, *Mathematics*, *Science* dan *Social Studies*. Dari hal ini dapat kita ketahui sejauh mana mereka mempertimbangkan Ilmu Sosial secara proporsional dalam pendidikan mereka.

Dari di atas, dengan kata lain, pendidikan semestinya tidak dapat sekedar wahana transfer pengetahuan, tetapi harus memuat pula pembentukan karakter sumber daya manusia dan tak bisa pula dilupakan adalah kesatuannya dengan aspek-aspek aplikasi pembangunan. Pada intinya peta pembangunan secara fisik serta sosial, harus optimal mencapai kondisi aplikasi. Lalu pertanyaannya, apakah pendidikan suatu negara itu hanya akan menjadi baik, setelah negara mengalami perjalanan ratusan tahun? Agaknya tidak demikian adanya bukan? Malaysia, Korea, atau Brunei Darussalam adalah bukan negara yang notabene tua seperti Jepang atau negara-negara di Eropa misalnya. **Tercatat Malaysia, Korea dan Brunei Darussalam merdeka pada tahun**. Yang perlu disiasati adalah percepatan dengan memperhatikan kecermatan strategi tentunya, jadi bukan semata kecepatan.

Kembali pada Masalah Pendidikan

Perlu kita pertimbangkan aset kita melalui pendidikan. Dengan pendidikan sesungguhnya dimungkinkan jaminan kapital yang berputar lebih baik. Jika kita mau seksama, sebenarnya perlu diketahui bahwa pendidikan teoritik baru (hanya) melampaui pencapaian level puas karena menikmati sesuatu (*satisfy due to consume*), belum mencapai level puas karena mengkreasikan sesuatu (*satisfy due to produce/ create or creative thinking as well as creative doing*). Dengan kata lain kita lebih menyadari bahwa saat ini generasi belum dibuat terdorong untuk berfikir kreatif. Berfikir kreatif yang sebenarnya akan sangat jauh dari wacana sekedar untuk dirinya (individualistik/ internalistik). Berfikir kreatif akan mendorong kebiasaan (*daily habit*) untuk memberikan manfaat bagi sebesar-besarnya lingkungan fisik dan juga lingkungan sosial.

Adalah konon Indonesia adalah negara kaya. Lalu pertanyaannya mengapa rakyat Indonesia miskin. Tetapi, menurut Brigita (Kompas, 20 Mei 2006), betulkah rakyat Indonesia miskin, bukankah di jalan-jalan raya bertebaran mobil ratusan juta? Itulah tadi di atas, banyak masyarakat yang semakin hari semakin memuaskan diri dengan aktivitas konsumsi, sementara produktivitasnya dipertanyakan. Inilah penyebab kesenjangan sosial itu. Pada kondisi ini kesenjangan terdorong terus meningkat, seperti bergulirnya bola salju yang tiada henti.

Sebenarnya, pemerintah melalui pendidikan mengharapkan generasi yang bagaimana? Mari kita lihat dalam analogi berikut. Jika dua orang tua meninggal sama-sama memiliki warisan yang banyak. Apa syarat warisan tersebut akan mungkin memberikan manfaat bagi lebih banyak umat manusia? Tentunya kemampuan anak mereka untuk secara bijak mampu mengelola harta peninggalan orang tua mereka. Bisa jadi bukan nominal warisan yang menentukan. Bisa terjadi warisan yang lebih sedikit nominalnya, jika si anak orang kaya tersebut kreatif, maka akan terkelola jauh lebih baik. Sebaliknya jika si anak kaya tersebut dididik boros, maka tidak perlu waktu lama untuk menghabiskan harta peninggalan orang tua mereka, bahkan bisa terjadi malah hutang yang menumpuk. Sama bukan dengan kondisi negara kita?

Jadi sebenarnya walau kedudukan potensi alam kita pada urutan ke-2 (menurut data Agenda 21) memang tidak sebagai hal mutlak sebagai potensi. Tergantung dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Sayangnya, menurut Survey UNDP tahun 2004 disebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia saat ini baru berada pada peringkat ke-109 dari 174 negara di dunia. Sementara itu, Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand masing-masing berada pada peringkat ke-41 sampai 44. Posisi negara kita bahkan di bawah Vietnam yang baru bangkit karena tekanan tentara Amerika Serikat. Di Asia, Indonesia hanya menempati posisi ke-45 dari 48 negara-negara Asia. Daya saing ekonomi berada pada peringkat ke-41, serta penguasaan iptek menempati posisi ke-40.

Perlu kita cermati, mengapa negara Jepang yang sebenarnya miskin, bisa menjadi negara kaya, yakni karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan SDA dan pula kualitas SDM yang sangat baik. Atau negara Swiss yang sebenarnya bahkan tidak memiliki lautan, tetapi bisa menjadi negara dengan pendapatan perkapita yang baik. Lalu bagaimana sebenarnya pengelolaan alam kita di laut maupun di darat, bagaimana pengelolaan SDM kita untuk kesiapan mengelola SDA? Akankah dibiarkan saja habis tanpa jelas rimbanya, bahkan yang terbesar adalah aktivitas proyek menumpuk hutang piutang ?

Kiranya Reformasi telah bergulir hampir 9 tahun lamanya, mesti kita pertanyakan lagi bagaimana implikasinya terhadap lingkungan fisik juga lingkungan sosial. Jangan-jangan masih terlalu berputar-putar sebatas wacana. Ketika kerusakan alam sebagai media terbesar manusia hidup, bahkan ketika peringkat prestasi korupsi sudah demikian adanya, kita masih tenang-tenang saja. Bahkan kita baru terhenyak sadar, ketika bencana alam datang, ketika berlalu sekian minggu, lalu kita kembali lupa. Pendidikan kiranya belum berhasil mendidik jiwa (*soul*).

Bagaimana mungkin berbagai sistem dapat terkelola dengan jauh lebih baik di negeri ini, bila banyak keputusan digerakkan di atas paradigma "instant" ? Budaya instant yang bila dicermati dilatarbelakangi kegagalan (kekurangberhasilan) mendidik jiwa (*soul*), karena sebenarnya berbagai kunci keteraturan di atas konteks keberlanjutan (*sustainability*), bukan sesuatu yang bisa simsalabim, tetapi digerakkan oleh kekuatan energi mayoritas alam bawah sadar/ jiwa (*soul*) manusia. Hanya akumulasi ekspresi jiwa yang terdidik yang mampu melahirkan aplikasi pembangunan bersama secara sangat signifikan, seperti yang terjadi di negara-negara maju, yang bahkan memiliki potensi SDA di bawah kualitas SDA Indonesia. Banyak hal mesti dilakukan, agenda terbesar yang menunjang keberlanjutan negeri sesungguhnya adalah pendidikan. Perputaran modal (*capital*) hanya akan terjamin dengan syarat modal sosial (*social capital*) yang tangguh, tanpa tersebut modal alam juga modal uang (*physical capital*), akan selalu sulit terkendali menurut harapan. Dan dengan ini kesenjangan baru bisa ditindaklanjuti pada sebatas wacana.

Sebuah Contoh Aplikasi dalam Pendidikan

Mengurai, bagaimana mestinya pendidikan Indonesia, tentunya sulit untuk diuraikan secara rinci dalam tulisan ini. Malah barangkali sebenarnya wacananya sudah banyak yang tepat, seperti pendidikan multikultural, wacana Kurikulum Berbasis Kompetensi dan lain sebagainya. Yang jadi masalah ada konsistensi pelaksanaan di lapangan, banyak sekali kendalanya, gaji guru yang kecil, aspek pengawasan yang belum optimal, fasilitas yang terbatas, dan sebagainya.

Tetapi khusus mengakhiri pada tulisan yang menyorot mengenai kesenjangan sosial ini, penulis intinya mengajukan pendekatan bahwa wacana pendidikan di atas harus nyata (*real*) dan sedekat mungkin dengan aspek-aspek aplikasi, misalnya pendidikan IPA, pendidikan IPS dan seterusnya. Dan kiranya ini bisa dilakukan secara perlahan, karena jika mengharap perubahan signifikan tentunya perlu dana tidak sedikit, dan lagi-lagi akan menjadikan keberlangsungan program menjadi sulit, bahkan lagi-lagi bisa lalu kembali berkisar pada wacana-wacana yang menjemukan. Yang kita lakukan dalam pendidikan kita selama ini secara teoritik bisa jadi sudah berlebihan (*abundant*), tetapi aspek aplikasi masih sangat jauh dari integral, ini perlu kita siasati dan tindaklanjuti. Dari hari ke hari populasi yang makin meningkat dan meningkatkan kesenjangan tersebut, sudah sangat sulit untuk hanya diselesaikan dengan cara berfikir dan aplikasi yang parsial.

Bagaimana jiwa (*soul*) SDM terdidik, sesungguhnya hanya akan lebih berhasil dengan penekanan aspek aplikasi dalam pendidikan. Jika tidak, lagi-lagi generasi yang terbentuk adalah mayoritas generasi yang teragap-gagap termasuk ketika arus globalisasi menerpa dengan kencang seperti saat ini menjadi sulit mengenal dan menyelesaikan permasalahan dengan lebih utuh dan tuntas. Kita semua tentu berharap episode ini bisa dilewati dengan lebih cepat dengan percepatan (*acceleration*) bukan ? Hanya dengan niat dan kontribusi bersama *miracle* seperti di Jepang atau Korea bisa kita capai !